

# 2025

Minggu ke-1 Desember  
(1 s.d. 7 Desember 2025)

# Isu Sepekan

Bidang Ekuinbang, Komisi VI



## UPAYA MENGURANGI DOMINASI IMPOR BAHAN BAKU MELALUI KEBIJAKAN SUBSTITUSI IMPOR

Rasbin

Analis Legislatif Ahli Madya  
rasbin@dpr.go.id

### Isu dan Permasalahan

Data Kementerian Perdagangan RI menunjukkan bahwa impor bahan baku dan barang penolong masih mendominasi struktur impor Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, periode 2020–2024, tiga perempat impor Indonesia adalah impor bahan baku dan barang penolong. Bahkan periode Januari–Oktober 2025, impor bahan baku dan barang penolong sudah mencapai 70,5% dari total impor Indonesia. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa impor bahan baku dan barang penolong pada Oktober 2025 tercatat sekitar US\$15,19 miliar, naik 9,9% dibandingkan September 2025 sebesar US\$13,82 miliar. Namun, secara tahunan angka tersebut masih lebih rendah atau turun 5,18% dibanding Oktober 2024 yang mencapai US\$16,02 miliar. Ini mencerminkan tingginya ketergantungan industri nasional terhadap pasokan input dari luar negeri.

Menurut ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ariyo Irhamna, sebagian besar impor bahan baku Indonesia bersifat *non-substitutable* dalam jangka pendek. Artinya, bahan baku yang diimpor Indonesia tidak dapat dengan mudah atau cepat digantikan oleh produksi dalam negeri atau alternatif lain dalam waktu dekat. Sekitar 74–76% impor bahan baku Indonesia merupakan komoditas yang belum dapat diproduksi di dalam negeri, seperti bahan kimia dasar, bahan baku farmasi, komponen elektronik, mesin dan suku cadang, gandum, pakan ternak, dan logam dasar khusus.

Dominasi impor bahan baku dan barang penolong dalam struktur impor Indonesia berpotensi meningkatkan kerentanan industri domestik terhadap gangguan rantai pasok global. Ketika terjadi krisis geopolitik, pandemi, atau disrupti logistik internasional, stabilitas produksi nasional menjadi mudah terganggu. Salah satu upaya untuk mengurangi dominasi impor bahan baku yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah melalui kebijakan substitusi impor.

Masih menurut Ariyo Irhamna, kebijakan substitusi impor yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia harus sejalan dengan struktur rantai nilai global atau *global value chain* (GVC). Fokus kebijakan tersebut harus diarahkan pada input yang memiliki dampak *backward linkage* tinggi seperti kimia dasar, pupuk, farmasi, plastik dasar, dan beberapa material baterai. Artinya, jenis-jenis input tersebut memiliki keterkaitan kuat ke belakang dalam struktur industri, sehingga pengembangannya memberikan efek pengganda yang luas dalam mendorong aktivitas ekonomi sektor hulu. Selain itu, kondisi ini juga akan memperkuat struktur industri nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor dalam jangka panjang.

Implementasi kebijakan substitusi impor tanpa memperhatikan besaran dampak dari *backward linkage* berpotensi menyebabkan kebijakan tersebut tidak efektif. Menurut Ariyo Irhamna, hal ini karena tingkat *domestic value added* (DVA) eksport manufaktur Indonesia masih rendah, yakni di bawah 50%.

# 2025

Minggu ke-1 Desember  
(1 s.d. 7 Desember 2025)

# Isu Sepekan

Bidang EKKUINBANG, Komisi VI

## Atensi DPR

Dominasi impor bahan baku dan barang penolong dalam komposisi impor Indonesia menunjukkan kuatnya dependensi industri nasional terhadap sumber input dari luar negeri. Situasi ini berisiko memperbesar kerentanan sektor industri domestik terhadap disrupti rantai pasok global. Salah satu langkah yang ditempuh Pemerintah Indonesia adalah mendorong kebijakan substitusi impor yang selaras dengan dinamika rantai nilai global. Prioritas perlu diberikan pada input dengan efek *backward linkage* tinggi untuk memperkuat sektor hulu dan mengurangi ketergantungan jangka panjang. Komisi VI DPR RI memegang peran strategis untuk mendorong Kementerian Perdagangan dan kementerian terkait dalam implementasi kebijakan substitusi impor melalui: (1) pemetaan substitutabilitas impor, yaitu penyusunan daftar bahan baku yang *non-substitutable*; disubstitusi dalam jangka menengah; dan sudah diproduksi lokal tapi belum terserap optimal; (2) sinkronisasi kebijakan lintas kementerian agar kebijakan perdagangan selaras dengan *roadmap* industrialisasi dan hilirisasi; dan (3) mendorong pemanfaatan produk bahan baku lokal melalui *business matching* dan insentif bagi industri yang menggunakan input domestik.

### Sumber

bps.go.id, 7 Desember 2025  
ekonomi.bisnis.com, 5 Desember 2025;  
kemendag.go.id, 7 Desember 2025.

# Isu Sepekan

Koordinator Sali Susiana  
Polhukam Puteri Hikmawati  
EKKUINBANG Sony Hendra P.  
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

## EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

EKKUINBANG

Sri Nurhayati Q.  
Rafika Sari  
Ari Mulianta Ginting  
Eka Budiyanti  
Edmira Rivani  
Hilma Meilani

Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Firyal Nabihah

Ulayya Sarfina  
Yosua Pardamean S.  
Jeffrey Ivan Vincent  
Fauzan Lazuardi R.  
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



Bridging Research to Parliament  
Evidence Based Policy Making

©PusakaBK2025